hal 4. SUARA MERDEKA
Perekat Komunitas Jawa Tengah

Israel Bermain Api

Oleh **Chusnan Maghribi**

BUKAN kali ini saja (pemerintah) Israel "bermain api" dengan melakukan provokasi serius: mengusik keberadaan Mesjid Al Aqsa (Haram Al-Sharif) di Kota Tua Jerusalem hingga mengganggu kenyamanan dan keamanan warga Palestina, Arab, maupun dunia Islam umumnya. Pada 1996 otoritas Israel di bawah Perdana Menteri (PM) Benjamin 'Bibi' Netanyahu membuka terowongan di bawah Masjid Al Aqsa, tempat suci ketiga umat Islam, sehingga mengobarkan pertumpahan darah dahsyat.

Akhir September 2000 pemimpin partai kanan Likud sekaligus penjabat PM saat itu (mendiang) Ariel Sharon mengunjungi kompleks Al Aqsa dan memicu pertumpahan darah dahsyat dalam rentang waktu cukup panjang (2000-2002) di Jalur Gaza maupun Tepi Barat yang kemudian dikenal dengan nama Intifada Al-Aqsa (Gerakan Intifada Kedua).

Oktober 2014 Netanyahu menerapkan kebijakan pembatasan usia pengunjung Al Aqsa: hanya umat Islam berusia 60 tahun ke atas yang diizinkan mengunjungi dan beribadah. Kebijakan ini menuai protes keras masyarakat Palestina serta memicu rangkaian aksi kekerasan yang menelan banyak korban jiwa baik di pihak Palestina maupun Israel. Rangkaian aksi kekerasan tersebut memaksa Netanyahu menganulir kebijakan kontroversial itu.

Berikutnya, Oktober 2015 pemerintahan Netanyahu kembali (mencoba) memberlakukan kebijakan kontroversial dengan menutup akses kompleks Masjidil Aqsa bagi segenap warga Palestina kecuali mereka yang bekerja di sana. Langkah ini membuat komunitas Muslim dan Nasrani (Kristen) tidak dapat mengakses Masjidil Aqsa dan Gereja Al-Qiyamah (Holy Sepulchre) yang memiliki sejarah khusus bagi kaum Nasrani. Kebijakan ini pun menyulut rangkaian aksi kekerasan yang juga merenggut tidak sedikit korban jiwa.

Dan, 14 Juli ini, PM Netanyahu kembali bermain api dengan memasang detektor logam di pintu masuk kompleks Masjidil Aqsa serta melarang setiap penduduk muslim berusia di bawah 50 tahun memasuki dan beribadah di sana. Kebijakan ini diberlakukan setelah dua polisi Israel dibunuh oleh tiga pemuda Palestina di Jerusalem.

Pemasangan detektor tersebut bukan saja diprotes warga Palestina dan Arab, melainkan juga masyarakat muslim dunia. Pemasangan detektor dipandang sebagai pelanggaran serius

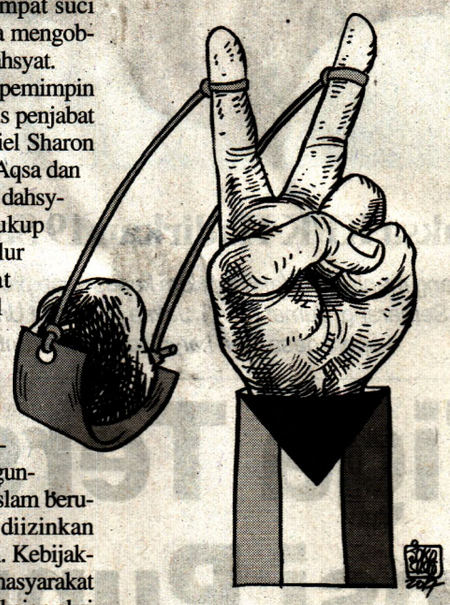

Israel terhadap status quo Masjidil Aqsa. Berdasarkan kesepakatan Israel-Jordania seusai Perang Arab-Israel 1967, pengelolaan Masjidil Aqsa (termasuk urusan keamanan dan pengamanan) ditangani otoritas Jordania. Warga nonmuslim diperkenanakan memasuki kompleks Al Aqsa, tetapi tidak diizinkan beribadah di sana. Pemerintah Negara Yahudi berulang kali melanggar kesepakatan tersebut.

Protes masyarakat Palestina sejauh ini tidak berhenti pada pernyataan-pernyataan verbal lewat para pemimpin mereka, melainkan sudah direfleksikan melalui aksi-aksi konkret perlawanan fisik seperti diperlihatkan seorang remaja bernama Mohammed Jawawdeh di Kota Wihdat-Jordania 23 Juli lalu. Dalam aksinya, Jawawdeh hanya bersenjata obeng berusaha menyerang petugas keamanan kantor Kedutaan Besar Israel di Amman. Jawawdeh akhirnya tewas ditembak petugas keamanan di sana. Namun, kematiannya tidaklah sia-sia. Pasalnya, hanya berselang dua hari (Selasa 25/7 dini hari) pemerintah Israel memutuskan untuk mencopoti detektor metal yang terpasang di pintu masuk Masjidil Aqsa.

Tak Kurangi Ketegangan

Melihat gelagat yang muncul saat ini, tampak pencabutan detektor itu tidak akan mengurangi ketegangan. Sekurangnya ada tiga indikasi.

Pertama, pencabutan tersebut tidak diikuti pencopotan kamera pengawas yang sudah terlebih dulu dipasang di kompleks Masjidil Aqsa. Malah, enam bulan ke depan penguasa Negeri Zionis itu akan memasang CCTV super canggih yang memiliki sensor pengenal dengan anggaran mencapai 28 juta dolar AS, setara Rp 373,04 miliar.

Kedua, ribuan pelayat dalam pemakaman Mohammed Jawawdeh di Kota Wihdat 26 Juli lalu bersumpah membalas kematian Jawawdeh dengan beragam aksi kekerasan bagi penduduk Israel di manapun, termasuk di dalam negeri Israel. Sumpah seperti itu biasa ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Ketiga, kebijakan kependudukan Israel tidak bersahabat bagi warga Palestina di Kota Tua Jerusalem. Warga Palestina di Jerusalem kini berjumlah sekitar 400 ribu jiwa dan hanya berstatus permanen residen. Sejak 1967 otoritas Israel kerap mendeportasi warga Pelstina dengan cara mempersulit pengurusan perpanjangan status permanen residen. Selama kebijakan ini diberlakukan selama itu pula akan terjadi resistensi warga Palestina di Jerusalem khususnya terhadap Israel.

Karenanya, sekiranya Israel serius ingin perdamaian sejati, Israel mesti berhenti bermain api dengan cara tidak lagi mengusik keberadaan Masjidil Aqsa, serta mengubah kebijakan kependudukan yang tidak bersahabat menjadi bersahabat terhadap warga Palestina di Kota Tua Jerusalem. (21)

— **Chusnan Maghribi**, *alumnus Hubungan Internasional Fisip UMY.*